

PENGARUH OPINI AUDIT, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PADA SITUS RESMI PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016)

THE EFFECT OF AUDIT OPINIONS, REGIONAL GOVERNMENT SIZE, AND THE GOVERNMENT FINANCIAL CAPABILITIES OF THE FINANCIAL INFORMATION AND NON FINANCIAL INFORMATION DISCLOSURE ON OFFICIAL SITES LOCAL GOVERNMENT

(Study on Local Government in Central Java Province 2015-2016)

Moh Sukron Makmum¹, Sri Rahayu²

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹mohsukron@students.telkomuniversity.ac.id, ²srirahayu@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pengungkapan informasi melalui situs resmi pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap pemerintahan daerah. Informasi yang tersedia pada situs resmi pemerintah daerah sebagian besar hanya berupa informasi umum daerah dan informasi keuangan yang tidak up to date . Beberapa daerah tidak melakukan pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Opini audit seharusnya diungkapkan kepada publik sebagai bentuk transparansi agar dapat membantu kinerja pemerintah. Pengungkapan informasi dapat dilakukan melalui situs resmi, media yang murah, dan mudah diakses dimana saja.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah. Variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. Hipotesis dalam penelitian ini adalah opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 30 data yang terdiri dari 15 situs pemerintah daerah dengan waktu dua tahun sebagai sampel dalam penelitian ini. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan menggunakan *software Eviews* versi 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Opini audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ukuran pemerintah dan kemampuan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang diprediksi dapat mempengaruhi pengungkapan informasi, seperti leverage , dan kekayaan daerah. Bagi pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kinerja agar mendapatkan opini yang baik, dan melakukan pengungkapan informasi kepada publik agar dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci : Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Tingkat Pengungkapan Informasi keuangan dan non keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Disclosure of information through official local government sites can increase stakeholder confidence in local government. The information available on the official site of local government is mostly just general information areas and financial information that is not up to date. Some regions do not disclose information on the official site of the local government in accordance with the applicable rules. Audit opinion should be disclosed to the public as a form of transparency in order to help government performance. Disclosure of information can be done through official sites, cheap media, and easily accessible anywhere.

The independent variables in this study are audit opinion, size of local government, and local financial capability. The dependent variable used is the disclosure level of financial and non financial information. This study aims to analyze the effect of audit opinion, local government size, and local financial capacity simultaneously and partially to the level of disclosure of financial and non financial information at the official site of local government in Central Java Province 2015-2016. The hypothesis in this research is audit opinion, local government size, and local financial ability have a significant positive influence simultaneously and partially to disclosure level of financial and non financial information at official site of local government in Central Java Province 2015-2016.

The population in this study is the official site of local government in Central Java Province in 2015-2016. Sampling technique using purposive sampling and obtained 30 data consisting of 15 sites of local government with two years time as sample in this research. Data analysis model used in this research is panel data analysis using Eviews version 9 software

The results show that audit opinion, size of local government, and local financial ability have influence simultaneously to the level of disclosure of financial and non financial information at official site of local government in Central Java Province. The partial audit opinion is negatively significant, while the size of the government and the financial capacity of the region have no significant effect on the level of financial and non-financial disclosure on the official site of the local government in Central Java Province.

For the next researcher it is suggested to add independent variables which predicted can influence information disclosure, such as leverage, and local wealth. For local governments it is advisable to increase local revenues, improve performance in order to get good opinion, and to disclose information to the public in order to increase stakeholder trust to the local government.

Keywords : *Audit Opinion, Local Government Measures, Local Financial Capacity, Level of Disclosure of Financial and non-financial Information on Official Site of Local Government.*

I. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004^[12] mengenai Otonomi Daerah dimana wewenang atas pengelolaan masing-masing daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola daerahnya. Informasi yang diungkapkan pemerintah daerah kepada masyarakat haruslah jelas. Informasi tersebut berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Pengungkapan informasi dapat dilakukan pemerintah daerah melalui media elektronik yaitu situs resmi (*e-government*). Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menkominfo No. 28 Tahun 2006^[8] tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah. Pengungkapan informasi melalui situs resmi sangat efektif dan efisien bagi pengguna informasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan investor.

Perintah untuk pengungkapan informasi pemerintahan pada situs resmi diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005^[9] tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mewajibkan pelaporan informasi keuangan daerah secara berkala melalui dokumen tertulis dan situs resmi pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan publikasi kepada pengguna informasi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SC/2012^[3] tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dimana pemerintah daerah harus menyiapkan menu konten dan melakukan publikasi data mutakhir dalam menu konten tersebut pada situs resminya.

Daerah di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi perintah untuk membuat menu konten TPAD dalam situs resmi pemerintah daerah, namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki menu konten tersebut. Situs resmi pemerintah daerah yang telah menyediakan menu konten ternyata juga masih belum melakukan

pengungkapan 12 item yang seharusnya diungkapkan (situs resmi pemerintah daerah). Salah satu item yang masih belum diungkapkan dalam situs resmi adalah satu set laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan CALK. Hal tersebut terbukti karena masih tingginya sengketa informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih enggan melakukan keterbukaan informasi publik.

Pengembangan situs resmi pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Pemerintah daerah hendaknya mengembangkan situs resmi dengan isi yang selalu baru, ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang memenuhi kebutuhan pengguna informasi, serta mudah diakses. Salah satu parameternya adalah minimum konten atau isi dan layanan publik.

Pada saat ini sudah banyak situs resmi pemerintah daerah yang dapat diakses dengan berbagai macam informasi dan tampilan. Hal tersebut mengakibatkan informasi minimum dan layanan publik yang seharusnya disajikan tetapi tidak tersedia dalam situs resmi pemerintah daerah (situs resmi pemerintah daerah).

Opini audit adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi, baik pemerintah itu sendiri untuk mengetahui kinerja dan melakukan evaluasi, serta masyarakat dan investor untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Opini audit yang diberikan oleh BPK menunjukkan tangka kewajaran pada LKPD. Menurut berita yang diakses di *metronews.com*, Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi hasil opini audit tidak dapat diakses sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui langsung opini terhadap pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situsnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses situs resmi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. E-GOVERNMENT

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*.

B. PENGUNGKAPAN

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan^[11].

C. OPINI AUDIT

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan^[7].

D. UKURAN PEMERINTAH DAERAH

Menurut^[4] dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintah dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun. Sedangkan menurut^[2] nilai dari ukuran perusahaan dapat diperoleh dari total asset perusahaan karena nilai aset cenderung lebih stabil.

E. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004^[12] tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Kemampuan keuangan daerah diukur dengan nilai kapasitas anggaran yang tersedia setelah dikurangkan dengan belanja wajib (belanja pegawai) perkapita. Belanja pegawai dikelurakan dari total belanja karena penggunaannya yang sudah terikat.

F. METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah Situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 15 situs resmi pemerintah daerah/kabupaten dan kota yang terdiri dari 15 daerah dan dalam waktu dua tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dan analisis regresi data panel. Rumus regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan maupun Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

X1 : Opini Audit

X2 : Ukuran Pemerintah Daerah

X3 : Kemampuan Keuangan Daerah

e : Error

III. PEMBAHASAN

A. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Berikut adalah hasil statistic deskriptif setiap variable operasional:

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Observation	Max	Min	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	30	1,0000	0,0000	0,7667	0,4302
Ukuran Pemda	30	29,5853	28,1124	28,6992	0,3708
Kemampuan Keuangan	30	15,9747	12,6819	13,6593	0,7111
Tingkat Pengungkapan	30	19,23%	80,77%	53,08%	15,60%

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2018

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata (*mean*) Tingkat pengungkapan yang lebih besar daripada standart deviasi berarti data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah memiliki mean yang lebih besar daripada standar deviasi yang berate bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

B. ANALISIS REGRESI DATA PANEL

Rumus regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = 31381.83 - 790.4169 X_1 - 0.089729 X_2 + 0.002803 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah

α : Konstanta

X1 : Opini Audit

X2 : Ukuran Pemerintah Daerah

X3 : Kemampuan Keuangan Daerah

e : Error

Nilai konstanta sebesar **31381.83** menunjukkan bahwa jika variabel independen pada regresi yaitu Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dianggap bernilai nol, maka nilai dari variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah adalah sebesar **31381.83** satuan. Koefisien regresi Opini Audit sebesar **-790.4169** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Opini Audit sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah akan menurun sebesar **790.4169** satuan. Koefisien regresi Ukuran Pemerintah Daerah sebesar **-0.089729** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Ukuran Pemerintah Daerah sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah akan menurun sebesar **0.089729** satuan. Koefisien regresi Kemampuan Keuangan Daerah sebesar **0.002803** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar **0.002803** satuan.

C. UJI HIPOTESIS

Uji hipotesis dilakukan dengan uji Langrange Multiplier. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F) berikut hasil uji secara simultan pada penelitian ini :

Tabel 2.

Hasil Pengujian Signifikansi *Common Effect Model*

Dependent Variable: PENGUNGKAPAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 07/21/18 Time: 18:02
 Sample: 2015 2016
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 30
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31381.83	15875.53	1.976742	0.0588
OPINI	-790.4169	305.1542	-2.590221	0.0155
UKPEM	-0.089729	0.055209	-1.625271	0.1162
KEMKEU	0.002803	0.019213	0.145902	0.8851

Weighted Statistics

R-squared	0.326028	Mean dependent var	8472.767
Adjusted R-squared	0.248262	S.D. dependent var	6247.968
S.E. of regression	1316.348	Sum squared resid	45052049
F-statistic	4.192432	Durbin-Watson stat	2.081707

Prob(F-statistic)	0.015128		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.216955	Mean dependent var	5307.667
Sum squared resid	55230980	Durbin-Watson stat	1.772781

Sumber: Hasil output Eviews versi 9 (data yang telah diolah)

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *prob (F-static)* adalah sebesar 0.015128 atau lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak, berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016).

i. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan

Variabel opini audit memiliki nilai koefisien regresi -790.4169 dengan signifikansi sebesar 0.0155. Nilai signifikansi tersebut memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 atau $0.0155 < 0.05$, sehingga variabel opini audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi secara keseluruhan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berarti bahwa apabila opini audit mengalami kenaikan maka tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan akan turun. Hal ini berarti semakin tinggi nilai opini audit maka tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan akan semakin kecil.

Opini audit juga merupakan proksi atas informasi keuangan pada LKPD sehingga lebih mencerminkan informasi keuangan daripada informasi non keuangan khususnya informasi pelayanan publik dan daerah secara umum yang menjadi objek penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rahim dkk., (2012)^[10] yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi.

ii. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan

Nilai koefisien negatif dari hasil uji t pada tabel 4.11 dalam pengujian data dan tidak diperoleh hasil signifikan secara statistik menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan maupun informasi non keuangan pada website pemda di provinsi jawa tengah. Masyarakat sebagai prinsipal memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penerimaan daerah, jadi terlepas dari apakah pemerintah mengelola aset dengan benar atau tidak, pemerintah akan memiliki penerimaan pendapatan (salah satu bagian dari aset) daerah itu sendiri. Dengan demikian, semakin besar nilai aset yang dimiliki tidak mendorong pemerintah daerah meningkatkan tingkat pengungkapannya.

Daerah dengan total aset besar cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan dari BPK. Namun daerah seringkali tidak memiliki informasi cukup terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laswad dkk., (2005)^[5] yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

iii. Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan

Dari hasil uji t pada Tabel 4.11 tidak diperoleh hasil yang signifikan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan maupun informasi non keuangan pada website pemda. Hal ini disebabkan resistensi Pemda untuk mengungkapkan informasi keuangan apabila kapasitas anggaran lebih besar karena kapasitas anggaran yang lebih besar dapat meningkatkan ketertarikan publik terhadap informasi sehingga dapat memicu pertanyaan yang lebih besar dari publik atas pertanggungjawaban kapasitas anggaran yang lebih besar. Nilai koefisien menunjukkan nilai positif yang berarti semakin besar kapasitas anggaran daerah maka pengungkapan informasi semakin besar.

Garcia-Sanchez et al. (2013)^[11] menjelaskan bahwa kapasitas anggaran yang tinggi akan meningkatkan kemampuan Pemda untuk pengembangan infrastruktur sistem informasi sehingga

mendorong Pemda untuk melaporkan informasi yang lebih banyak. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan tidak lebih besar. Menurut penulis, pengembangan infrastruktur mungkin dapat lebih ditingkatkan dengan posisi pemda yang memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar, namun hal ini belum tentu meningkatkan jumlah pengungkapan informasi sehingga diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terkait terhadap informasi non-keuangan sebelumnya yang dilakukan oleh Martani et al. (2013)^[6] yang menyatakan kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat informasi non-keuangan pada website.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, secara simultan variable independen yang terdiri dari opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Sedangkan, secara parsial menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh secara negative terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Sedangkan variable ukuran pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan.

Daftar Pustaka :

- [1] Garcia & Garcia-Garcia. 2010. Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, 679-695.
- [2] Hidayat, Shodiq Nur dan Isroah. 2006. Pengaruh Karakteristik Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Return. *Jurnal Profita*, 6.
- [3] Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- [4] Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 9(1): 41-62.
- [5] Laswad, et al. (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* 24. 101-121.
- [6] Martani, et al. 2013. Disclosure of Non-Financial Information about Public Service on the Official Website of Local Governments in Indonesia.
- [7] Masdiantini, P. R. Dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14:1150-1182.
- [8] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- [10] Rahim Mustika, Wanda., Martani, Dwi. (2012). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia: Jakarta
- [11] Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah